

Teduh dan Tetap Utuh: Dua Pilar Masa Depan yang Sama-Sama Dipertaruhkan

Dua hal yang sering dianggap tidak saling berhubungan adalah hutan dan pendidikan.

Padahal, keduanya memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Hutan bukan hanya sekadar kumpulan pohon, melainkan bagian dari identitas bangsa, terutama bagi masyarakat adat yang hidup tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Bagi masyarakat adat, hutan adalah rumah, tempat mencari kehidupan, sekaligus ruang belajar tentang alam dan nilai-nilai kehidupan. Namun, dari tahun ke tahun, wilayah hutan di Indonesia semakin menyusut. Banyak hutan yang diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga keberadaan hutan dan kehidupan masyarakat adat semakin terancam. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi masalah serius di berbagai daerah. Kurangnya fasilitas yang memadai, jarak sekolah yang jauh, serta anggaran pendidikan yang belum dikelola dengan baik membuat banyak anak kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak.

Ketika hutan rusak dan pendidikan terabaikan, masa depan bangsa ikut dipertaruhkan.

Dilihat dari kacamata pandang masyarakat adat, keberadaan hutan adalah hal krusial yang juga menyangkut soal kehidupan mereka. Lebih dari sekedar tempat tinggal, ruang mencari makanan, namun juga tempat bertumbuhnya pengetahuan. Ada beragam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mulai dari nilai budaya dan identitas hingga nilai ekologis dan kelestarian. Masyarakat adat menggunakan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan hutan, dengan tujuan agar ekosistem tetap lestari, mencegah banjir, dan menjaga kesuburan tanah. Sementara nilai identitas yang berarti, hutan adat adalah bagian dari identitas sosial dan budaya, tempat bersemayamnya warisan leluhur, serta menjadi simbol penguasaan wilayah adat. Tak berhenti hanya di sana, identitas budaya yang berupa kumpulan pepohonan hijau ini juga memberikan potensi besar dalam dunia pendidikan. Anak-anak masyarakat adat dapat belajar mengenal alam, menghormati sesama, serta hidup seimbang dengan lingkungan.

Ketika hutan adat hilang, maka pengetahuan dan cara hidup mereka ikut terancam hilang.

Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara menunjukkan, konsesi pertambangan berada di kawasan hutan seluas 72.775 hektar. Kawasan itu terdiri atas hutan lindung Ake Kobe, hutan produksi, serta hutan produksi terbatas (HPT). Di wilayah-wilayah ini merupakan ruang hidup masyarakat adat. Hal di atas menunjukkan bahwa, hutan adat ditebang besar-besaran demi meraih segelintir keuntungan. *“Ini operasi produksi wilayah yang cukup besar dan akan menggerus hutan semua. Otomatis semua makhluk hidup di dalam hutan termasuk Orang Tobelo Dalam akan habis,”* kata pria yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara ini. Kini, tempat masyarakat adat bergantung hidup semakin tergerus dan diabaikan.

Syahril Tahir, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, menyesalkan izin prinsip yang kini jadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut dia, temuan di lapangan menunjukkan masyarakat berkonflik dengan perusahaan karena lahan mereka diserobot.

Kondisi Pendidikan juga sama mengenaskannya, ada timbal balik dari semua peristiwa eksploitasi yang terjadi. Hutan adat yang selama ini telah menjadi tempat mata pencaharian, ruang bagi mereka untuk berpenghasilan, semakin dirasa tidak penting bagi mereka yang haus akan harta. Ketika hutan adat rela dikorbankan menjadi lahan pertambangan, anak-anak semakin sulit melanjutkan sekolah. Sekalipun ada kesempatan untuk bersekolah, lokasinya jauh dan fasilitasnya terbatas. Akibatnya, anak-anak masyarakat adat tertinggal dalam pendidikan, bukan karena tidak ingin belajar, namun karena kondisi. Dua hal yang semestinya menjadi tumpuan kita, diperlakukan seolah tidak penting. Padahal, tanpa hutan dan pendidikan, masa depan menjadi sesuatu yang dikorbankan.

Semua masyarakat Indonesia memegang hak atas berdirinya hutan adat, juga pendidikan yang layak. Mereka menyuarakan ketidakadilan yang selama ini menghantui, sebab wilayah yang ada akan habis oleh tangan-tangan serakah. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan hutan mereka secara fisik, tetapi juga hak atas kehidupan dan masa depan. Saat demonstrasi menuntut pengakuan hutan adat, mereka menulis:

“Kami minta hak kesejahteraan kami yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua supaya hutan adat dapat kami kelola untuk kesejahteraan hidup kami dan anak cucu kami.”

Kunci bertahannya keberadaan hutan adat, juga ada di keputusan kita. Tidak perlu untuk langsung ke terjun ke lapangan, ada berbagai hal-hal sederhana yang sejatinya akan sangat berpengaruh. Menghargai perbedaan budaya, belajar tentang masyarakat adat, serta mulai menaruh peduli pada lingkungan sekitar. Sebab, pendidikan yang baik semestinya, menghormati budaya lokal, menjaga hutan, bukan merusaknya.

Hutan dan pendidikan bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling berkaitan dan sama-sama menentukan masa depan bangsa. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya ruang hidup, tetapi juga sumber pengetahuan, identitas, dan pendidikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika hutan adat dirusak dan diambil alih, masyarakat adat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk hidup dan belajar secara layak.

Di sisi lain, pendidikan yang tidak merata semakin memperparah kondisi tersebut. Anak-anak masyarakat adat tertinggal bukan karena kurangnya semangat belajar, melainkan karena keterbatasan akses dan fasilitas. Oleh karena itu, menjaga hutan adat berarti juga menjaga hak pendidikan dan masa depan generasi penerus. Jika bangsa ini ingin memiliki masa depan yang teduh dan tetap utuh, maka hutan dan pendidikan harus dijaga, dihormati, dan diperlakukan sebagai pilar utama pembangunan, sekaligus tonggak berdirinya sebuah peradaban.

Keterangan:

JUDUL ARTIKEL

PENDAHULUAN

ISI ARTIKEL

KESIMPULAN